



# Kami Tidak Mampu

## ■ Pemkab Sleman Sebut Anggaran untuk Pendidikan Gratis Terbatas



**Mudah-mudahan ada evaluasi dari putusan MK tersebut. Karena sebetulnya pemerintah tidak mampu, kalau sekolah swasta dan negeri gratis.**

**SLEMAN, TRIBUN** - Bupati Sleman, Harda Kiswara, menegaskan jika keuangan Pemkab setempat terbatas. Sehingga, pihaknya tidak sanggup untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan penyediaan pendidikan SD-SMP gratis untuk negeri maupun swasta.

"Mudah-mudahan ada evaluasi dari putusan MK tersebut. Karena sebetulnya pemerintah tidak mampu, kalau sekolah swasta dan negeri gratis," kata Harda, Rabu (11/6).

Harda mencontohkan, Pendapat Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman sekitar Rp1 triliun rupiah. Pembiayaan yang harus dikeluarkan pemerintah selama ini cukup banyak.

● ke halaman 11

- MK mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) lewat keputusannya belum lama ini.
- Kewajiban tersebut berlaku bagi sekolah negeri dan swasta.
- Pemkab Sleman dan Pemkot Yogya menyebut keputusan ini cukup berat dilaksanakan.
- Bupati Sleman menyebut pihaknya tidak mampu untuk memberikan pendidikan gratis karena anggaran terbatas.
- Pemkot Yogya juga menyebut anggaran untuk menggratiskan sekolah swasta cukup berat.
- Pemkab Bantul dan Gunungkidul masih menunggu petunjuk teknis dari pusat.
- DPRD Kulon Progo bahkan menilai keputusan ini cukup positif.



GRATIS FAUZILARAKHMAN

## Kami Tidak Mampu

■ Sambungan Hal 1

Menurut Harda, jika harus menggratiskan semua sekolah SD maupun SMP di Kabupaten Sleman, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan. Apalagi, kata dia, jumlah satuan pendidikan dasar di Bumi Sembada cukup banyak.

Oleh karena itu, menurut Harda, skema pembiayaan dibagi dengan swasta sudah cukup bagus.

"Kalau permasalahan di sekolah swasta hanya karena siswa tidak sanggup mengambil ijazah, saya sudah meminta Dinas Pendidikan untuk menghimpun

sekolah sekolah swasta SD-SMP yang anaknya tidak mampu mengambil ija-

zah Penda ambil alih. Kalau permasalahan itu Penda mampu. Tapi kalau

diminta membiayai semua (sekolah gratis), tidak

mampu," katanya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, "Sri Adi Marsanto, meng-

atakan, total SD di Sleman saat ini sebanyak 512 sekolah, terdiri dari 374 negeri dan 138 swasta. Sementara itu, jumlah SMP sebanyak 122 sekolah, dengan rincian 54 negeri dan 68 swasta.

"Bisa dibayangkan nanti kalau memang itu harus dibiayai oleh anggaran pemerintah, baik itu pusat maupun daerah," ucap Adi.

Ia menambahkan, pihaknya masih menunggu keputusan teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) terkait wujud implementasi putusan MK tersebut.

"Nanti dari putusan MK pasti dicermati, dikaji, lalu dimandulkan seperti apa, wujudnya apa. Misalkan apakah itu Permendikdas-

men, apakah itu SE (surat edaran)," katanya.

**Belum bisa diterapkan**  
Ketua Komisi D DPRD Sleman, Arif Priyusanto menilai putusan MK yang

menyebutkan penyediaan sekolah SD dan SMP gratis, belum bisa diterapkan di Kabupaten Sleman. Selain

beban anggaran yang terlalu besar, perlu klasifikasi sekolah juga, apakah sekolah elite yang mahal-mahal akan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Kalau misalkan semuanya, tanpa pengecualian berarti kurikulum dan kegiatan mengajarnya menyesuaikan dari peraturan pemerintah. "Apakah sekolah tersebut sudah siap atau belum. Itu perlu kajian lebih lanjut," ujar dia.

Sementara itu, realisasi pendidikan dasar gratis jenjang SD-SMP negeri dan swasta di Kota Yogyakarta dipastikan belum bisa dilak-

sanakan tahun ini. Berbeda dengan pendidikan dasar negeri di Kota Yogyakarta yang sudah digratiskan sejak beberapa tahun silam, butuh perencanaan lebih jauh untuk membebaskan

biaya siswa sekolah swasta. Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, So-

lithul Hadi, mengatakan, jika pendidikan dasar gratis sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah daerah, dipas-

angkan sangat memberatkan. Oleh sebab itu, pihaknya meyakini, ke depan akan

ada anggaran dari pusat atau APBN, yang diturunkan ke daerah untuk men-

subsidi program tersebut. "Sama seperti makan

bagus gratis, itu kan program pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah, namun pembiayaan-

nya tidak semua di-cover pemerintah daerah. Kalau alokasinya semua dari pemerintah daerah, saya me-

lihat agak berat," ujarnya.

**Jangan korbankan kualitas**  
Solihul pun berharap program ini tidak dijalankan "seadanya", dan men-

gembalikan kualitas pendidikan yang selama ini dimiliki oleh sekolah-sekolah swasta. Menurutnya, orang

tua siswa, rela membayarkan mahal untuk menyekolahkan anaknya di SD atau

SMP swasta, lantaran menginginkan kualitas yang cenderung mumpuni.

"Sekalipun ini gratis, kami tidak ingin ada penurunan kualitas pendidikan. Harus dijaga mutu

pendidikannya, hingga honorarium gurunya, karena yang tadinya mandiri

sekarang di-take over oleh pemerintah," terangnya.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta, Hastu Wardoyo, menuturkan

kemampuan APBD Kota Yogyakarta ada batasannya, di mana untuk sektor pendidikan sudah diplo 20

persen. Ketika diharuskan menggelontorkan anggaran untuk jaminan pendidikan, termasuk bagi siswa di se-

kolah swasta, dikhawatirkan sektor lain jadi korban. "Kalau disuruh jauh di

atas 20 persen, ya habis, lainnya ngga kebagan. Kan tidak mungkin semua

uang untuk menyekolahkan warga, terus jalan yang rusak, lampu yang mati, tidak diperbaiki, kan nggak mungkin," terangnya.

Alhasil, dengan plafon yang ada, pihaknya harus menyetujui keputusan penggratiran SD-SMP negeri dan swasta ini dengan

standar yang dimiliki Pemkot Yogyakarta. Dalam artian, eksekusi tidak akan

mampu ketika dipaksa menyesuaikan dengan standar SD swasta yang

dana operasionalnya sangat tinggi.

"Kalau harus disesuaikan dengan operasional sekolah swasta seperti

sekarang kan tidak mungkin, karena operasionalnya tinggi. Tapi, saya belum

tahu juga, kapan keputusan MK itu akan dilaksanakan," ungkapnya.

**Tunggu arahan**  
Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Gunung-

kidul menyebut masih menunggu arahan pusat terkait kebijakan sekolah

gratis untuk pendidikan swasta dan negeri jenjang

SD. Kepala Disdik Gunungkidul, Nunuk Setyowati, mengatakan, sampai

saat ini pihaknya belum mendapatkan arahan resmi dari pemerintah pusat

soal penerapan sekolah gratis.

"Belum bisa menjelaskan lebih banyak karena

menunggu dari pusat," ucapnya, saat dikonfirmasi pada Rabu (11/6).

Ia mengatakan, jika nanti sudah ada keputusan resmi dari pusat yang disampaikan ke pemerintah

daerah soal sekolah gratis, pihaknya mengaku akan siap menindaklanjutinya.

"Tentu, akan tetap mengikuti kebijakan dari pusat seperti apa, dan pastinya akan ada kajian juga," pap-

ar dia.

Dia mengatakan, pihaknya pun belum berani melakukan sosialisasi ke

sekolah-sekolah terkait kebijakan tersebut. "Belum ada, karena petunjuk

teknisnya pun kami belum punya, jadi posisi kami se-

karang masih menunggu (arahan) pusat," terangnya.

Di sisi lain, Nunuk mengatakan selama ini untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pihaknya juga

mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat lewat

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Adapun, dana BOS ini dibagikan ke

semua sekolah dari jenjang pendidikan, Kelompok Ber-

mita (KB), Taman Kanak-kanak (TK), SD, SMP, hingga SMA/SMK.

"Adapun besaran dana yang diterima setiap sekolah, bervariasi, tergantung pada

jumlah siswa yang terdaftar di sekolah tersebut," kata dia.

**Siap dilaksanakan**  
Sementara, Pemkab Bantul "Belum" mendapatkan petunjuk teknis terkait peng-

gunaan anggaran untuk menjalankan putusan MK.

"Tentu prinsip bahwa kalau itu sudah menjadi kebijakan pemerintah, pasti

kami laksanakan. Itu prinsipnya dulu, nanti mandatori seperti apa akan kami

ikuti karena sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan petunjuk teknis pener-

apan putusan MK itu," kata

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Bantul, Agus Budharahja, Rabu

(11/6).

Disampainya, memang benar bahwa pendidikan jenjang SD dan SMP

itu berada di ranah Pemkab Bantul. Lalu, untuk SD dan

SMP negeri sudah diterapkan sistem pendidikan yang

bersifat gratis atau tidak berbayar bagi para peserta didiknya. Lain halnya dengan

swasta yang masih bersifat berbayar.

"Jadi, swasta ini, tentu kami tunggu formulasinya. Tapi, meskipun swasta kan

selama ini tetap ada kontribusi dari kami. Cuma kan, kalau itu gratis ya seberapa

besar yang harus recover dan standarnya, formulasi-

nya, itu dilihat dulu," jelasnya.

Sebab, lanjut Agus, selama ini ada beberapa sekolah swasta yang meng-

gunakan formula anggaran yang tinggi. Maka, sampai

saat ini pihaknya juga masih bertanya-tanya apakah

sekolah swasta itu nanti akan mendapatkan formulasi

anggaran setara dengan sekolah negeri.

"Atau bahkan apakah nanti yang swasta itu juga digratiskan dengan standar

tinggi, tetapi kemudian pemerintah yang akan meng-

cover biayanya. Tapi, saya rasa kan juga tidak ya, itu pasti ada formulasi-

nya. Nah, itu yang masih kami tunggu sampai saat ini," tutur Agus.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo, Edi Pri-

yono merespons positif keputusan MK tersebut. Sebab

nantinya layanan pendidikan bisa menjangkau semua

lapisan masyarakat.

"Jadi beban para wali pe-

lajar bisa teralihkan jika nanti sekolah digratiskan," ujar

Edi.

Jika sudah ada kebijakan pemerintah, ia menilai program sekolah gratis

akan menjadi jawaban akan permasalahan terkait

biaya pendidikan. "Sebab

meski sudah banyak program bantuan pendidikan, tetap saja ada berbagai bi-

aya yang harus dibayarkan para wali pelajar.

Namun Edi tak menampik jika kebijakan tersebut

nantinya berdampak pada

kebutuhan anggaran yang

lebih besar. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulon

Progo terbelah kecil untuk

membayar semua sektor

pembangunan, termasuk pendidikan.

"Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo nanti

nya harus jeli dalam meny-

usun skala prioritas pen-

gembangan, termasuk jika

nantinya program sekolah

gratis terlaksana," jelasnya.

(rifka wahid/pelajar)

| Instansi                                 | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 14 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005